

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta interaksi antara UMP dan RLS terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di kawasan Sumatera, Riau, dan Kalimantan periode 2011–2025, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA di kawasan Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Temuan ini menolak hipotesis awal (H1) yang menduga pengaruh negatif. Hasil ini mengindikasikan bahwa investor asing tidak lagi memandang upah minimum semata sebagai biaya produksi, melainkan sebagai sinyal kualitas tenaga kerja, stabilitas sosial ekonomi, serta daya beli masyarakat yang tinggi. Kenaikan UMP yang diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja justru menjadi daya tarik bagi investasi asing, terutama pada periode pemulihan ekonomi 2022-2025.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA di kawasan Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Temuan ini menolak hipotesis awal (H2) yang menduga pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dianggap sebagai ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, sehingga menarik investasi asing, khususnya pada sektor padat karya dan sektor berbasis sumber daya alam yang mendominasi struktur ekonomi ketiga kawasan tersebut.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PMA di kawasan Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Temuan ini tidak mendukung hipotesis awal (H3) yang menduga pengaruh positif signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat pendidikan penduduk menunjukkan tren peningkatan, namun pada level rata-rata 3,00-11,43 tahun, kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui RLS belum cukup menjadi pertimbangan utama investor asing. Hal ini disebabkan oleh dominasi investasi di sektor sumber daya alam yang

bersifat padat modal, serta masih adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan formal dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan pasar kerja.

4. Interaksi antara Upah Minimum dan Rata-rata Lama Sekolah ($UMP \times RLS$) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap PMA di kawasan Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Temuan ini tidak mendukung hipotesis awal (H4) yang menduga pengaruh positif signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara UMP dan RLS bersifat substitutif daripada komplementer, di mana kenaikan upah minimum belum dapat dikompensasi oleh peningkatan rata-rata lama sekolah pada level pendidikan yang masih tergolong sedang. Efek threshold (ambang batas) diduga menjadi penyebab utama, di mana pengaruh positif interaksi baru terlihat setelah RLS mencapai level minimum tertentu.
5. Secara simultan, variabel UMP, TPT, RLS, dan interaksi $UMP \times RLS$ berpengaruh signifikan terhadap PMA di kawasan Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Temuan ini mendukung hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa keempat variabel secara bersama-sama memengaruhi arus masuk investasi asing. Namun, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 27,33% menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi PMA, sementara 72,67% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model seperti infrastruktur, kebijakan investasi, stabilitas politik, dan ketersediaan sumber daya alam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1. Saran Teoritis

1. Penambahan variabel determinan PMA yang lebih komprehensif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel-variabel lain yang secara konseptual memiliki pengaruh kuat terhadap PMA, seperti ketersediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, dan konektivitas digital), indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), stabilitas politik dan keamanan, kebijakan fiskal dan

insentif investasi, serta kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi PMA yang saat ini masih rendah (27,33%).

2. Penggunaan metode estimasi yang lebih lanjut. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) dinamis, baik difference GMM maupun system GMM, untuk mengatasi masalah endogenitas, dinamika investasi yang bersifat path-dependence, serta potensi masalah instrumen lemah. Selain itu, penggunaan Panel Corrected Standard Errors (PCSE) atau Driscoll-Kraay Standard Errors juga dapat dipertimbangkan untuk menghasilkan estimasi yang lebih robust terhadap heteroskedastisitas dan korelasi antar panel.
3. Perluasan cakupan sampel dan periode analisis. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel dengan memasukkan seluruh provinsi di kawasan Sumatera, Riau, dan Kalimantan, termasuk provinsi yang baru terbentuk seperti Kalimantan Utara, serta provinsi dengan kontribusi PMA yang lebih kecil, dengan terlebih dahulu memastikan ketersediaan data yang lengkap dan konsisten. Selain itu, analisis terpisah untuk masing-masing fase ekonomi (pra-pandemi, krisis COVID-19, dan pemulihan ekonomi) juga direkomendasikan untuk menangkap perbedaan dinamika hubungan antarvariabel pada setiap fase.

5.2.2. Saran Praktis

1. Mengingat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di kawasan Sumatera, Riau, dan Kalimantan masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pengaruhnya yang belum signifikan terhadap PMA, maka pemerintah daerah wajib memprioritaskan percepatan wajib belajar 12 tahun hingga tuntas sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa capaian minimal setara SMA, peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak akan optimal sehingga pemerintah daerah harus memastikan seluruh

penduduk usia sekolah, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dapat mengakses pendidikan menengah melalui pembangunan sekolah SMA dan SMK di daerah perbatasan serta pedalaman. Selain upaya pemerataan akses secara kuantitatif, pemerintah daerah juga perlu mendorong relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri melalui penguatan pendidikan vokasi (SMK) yang selaras dengan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertambangan, perkebunan sawit, migas, dan hilirisasi, serta penguatan kualitas pendidikan umum (SMA) dalam hal literasi digital, matematika terapan, dan bahasa asing guna mengantisipasi pergeseran investasi ke sektor teknologi dan jasa di masa depan. Langkah strategis ini perlu didukung oleh program pelatihan vokasi terpadu dan magang bersertifikat yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing dari Singapura, China, Jepang, dan Korea Selatan yang telah beroperasi di kawasan tersebut, sekaligus pengintensifan pengajaran bahasa Inggris dan Mandarin dalam kurikulum SMA dan SMK agar tenaga kerja lokal mampu berkomunikasi teknis dan administratif dengan pihak manajemen asing, sehingga kesenjangan antara kurikulum formal sekolah dengan kebutuhan riil industri dapat dijembatani dan daya saing tenaga kerja daerah meningkat secara signifikan.

2. Penyesuaian kebijakan upah minimum dengan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah provinsi diharapkan dapat menetapkan kebijakan upah minimum yang tidak hanya mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tingkat produktivitas tenaga kerja di masing-masing daerah. Kebijakan upah yang berbasis produktivitas akan menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing investasi, sehingga kenaikan UMP dapat menjadi sinyal positif bagi investor asing sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini.
3. Penguatan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur dan kemudahan berusaha. Mengingat keterbatasan model dalam

menjelaskan variasi PMA (72,67% dipengaruhi faktor lain), pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan, listrik, dan konektivitas digital), menyederhanakan prosedur perizinan, memberikan insentif investasi yang kompetitif, serta memastikan kepastian hukum dan stabilitas kebijakan. Faktor-faktor ini merupakan determinan penting yang secara empiris terbukti memengaruhi keputusan investor asing di luar variabel ekonomi makro.

4. Strategi investasi yang adaptif terhadap karakteristik regional. Pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk merumuskan kebijakan investasi yang bersifat spesifik regional dengan mempertimbangkan karakteristik unggulan masing-masing provinsi. Provinsi dengan dominasi sektor sumber daya alam (Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan) perlu fokus pada peningkatan nilai tambah dan hilirisasi industri, sementara provinsi dengan potensi industri dan perdagangan (Kepulauan Riau, Sumatera Utara) perlu memperkuat daya saing tenaga kerja dan kemudahan berusaha. Pendekatan yang adaptif dan berbasis potensi daerah akan lebih efektif dalam menarik investasi asing yang berkelanjutan.
5. Penguatan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap guncangan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh dan responsif terhadap krisis, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19. Perluasan program padat karya, perlindungan pekerja sektor formal dan informal, serta dukungan bagi UMKM perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja dan kepercayaan investor asing, terutama pada masa-masa krisis ekonomi.